

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena semakin rusaknya tatanan politik dewasa ini diwarnai dengan bentuk kehidupan Negara yang brutal dan tak bermoral. Maraknya kasus-kasus korupsi, teroris, diskriminasi, pembunuhan, kemiskinan dan lain-lain merupakan tanda gagalnya politik dalam sebuah Negara. Hal ini bisa saja terjadi karena politik kurang melibatkan peranan moral.¹ Struktur-struktur kehidupan politik tidak lagi menunjang suatu etika yang memadai.

Pengalaman empiris dengan nada miris, seperti, kian memekiknya jeritan suara kaum lemah, korban ketidakadilan yang digusur, dianiaya, dan yang diperkosa hak asasinya. Hal yang paling jelas menampilkan sisi buramnya yaitu politik. Tidak sedikit orang berebutan kuasa, memilikinya, memanfaatkan kedudukan, posisi, pangkat untuk menindas dan memperdaya orang lain. Sejak hampir lima tahun terakhir, Negara Indonesia terus-menerus digoncangkan oleh ceritera-ceritera ‘horor’ baru tentang *money politics*, penyalahgunaan wewenang pejabat, penyelewengan dana ke kantong pribadi (korupsi). Pada tataran ini, terjadilah peminggiran essensi politik yang sejatinya adalah mulia dan luhur. Karena itu, ada pelbagai polemik yang muncul di kalangan masyarakat mengenai arti politik itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwa politik adalah permasalahan terumit dalam kehidupan manusia, karena begitu sulitnya kata politik dimengerti. Bahkan beberapa menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor dan nista, di mana yang putih dikatakan sebagai hal yang hitam dan diperlakukan pula sebagai hal yang hitam, begitu pun sebaliknya.²

Ada yang takut mendekati politik, karena politik diidentikkan sebagai sesuatu yang dapat membawa seseorang ke dalam jurang kenistaan. Ada pula yang menganggap arena politik sebagai sebuah ruang bagi peleburan konsep perkawanan menjadi kian tak jelas,

¹Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), hlm. 14.

²Mansyur Sema, *Negara Dan Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 88.

hingga saling jegal, saling senggol, saling bermusuhan sudah menjadi hal yang lumrah.³ Seseorang menolak politik, karena praktik-praktik teknis dari kata tersebut berkenaan dengan kekuasaan, kewajiban atau pun kesepakatan, di mana orang-orang yang ikut andil di dalamnya, melakukan cara-cara yang kotor dalam pencapaiannya.⁴ Seseorang yang menolak cara-cara yang dilakukan oleh para elite politik itu, serta merta menisbahkan pula penolakannya pada kata politik itu sendiri.

Berkenaan dengan permasalahan yang timbul akibat penerapan teori dan praktik politik yang tidak sejalan, Gereja melalui Konsili Vatikan II, dalam konstitusi pastoral tentang Gereja dalam dunia dewasa ini, *Gaudium et Spes*, menekankan dimensi etis politik dalam hubungannya dengan relasi tak terpisahkan manusia dengan politik. sebab pada hakikatnya, sebuah gagasan politis yang benar apabila diterapkan dengan baik akan mengarahkan kehidupan bersama ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan bersama (*Bonum Commune*).

Oleh karena politik berelasi dengan manusia dan pada gilirannya kembali kepada *Bonum Commune*-nya manusia, Gereja yang juga adalah segenap manusia tidak dapat mengelak dari tanggungjawab sosialnya. Gereja turut terpanggil untuk menyatakan solidaritasnya kepada persoalan-persoalan yang terjadi di sekitarnya. Bahwa kendati pun bidang kerja Gereja seyogyanya adalah rohani, tetapi keterlibatan Gereja sesungguhnya bukanlah untuk mengkultuskan tata politik. Demikian pun politik tidak berpretensi mensekulerkan dunia Gereja. Kemuliaan kedua entitas ini tidaklah terletak dalam penjagaan *status quo* setiap entitas yang mengitarinya. Tetapi sebaliknya, terletak pada upaya menjalin kerja sama yang signifikan, yang membangun, memanusiakan dan menyejahterakan. Baik politik maupun Gereja terkait erat dengan eksistensi manusia sebagai makhluk politis (*zoon politicon*).

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, hlm. 89.

Menyadari betapa pentingnya relasi yang harmonis dalam hidup sosial-politik masyarakat, maka penulis melihat gagasan *Gaudium et Spes* artikel 74 tentang etika politik sebagai ketentuan normatif yang berusaha mengemukakan gagasan politis yang benar demi menjamin *Bonum Commune* di bawah judul: ***ETIKA POLITIK: KETENTUAN NORMATIF DALAM MEMPERJUANGKAN SEBUAH GAGASAN POLITIS DEMI MENJAMIN KESEJAHTERAAN UMUM DALAM TERANG GAUDIUM ET SPES ARTIKEL 74.***

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penulisan di atas, maka penulis akan merumuskan persoalan-persoalan utama yang akan diuraikan dalam tulisan ini, yakni sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksudkan dengan etika politik?
2. Apa yang menjadi prinsip dasar dari etika politik?
3. Apa yang dimaksudkan dengan *Bonum Commune*?
4. Bagaimanakah etika politik diaplikasikan dalam memperjuangkan gagasan politis yang benar demi menjamin *Bonum Commune* menurut *Gaudium et Spes* artikel 74?

1.3 Tujuan Penulisan

Melalui tulisan ini, penulis bermaksud mencari dan mengumpulkan data-data tertulis yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang dimaksudkan di atas. Adapun tujuan yang hendak dicapai, yaitu berusaha untuk menjelaskan dimensi etis dalam berpolitik sebagai sebuah norma politis demi mencapai gagasan politis yang terarah kepada kesejahteraan umum dalam terang *Gaudium et Spes* artikel 74.

1.4 Kegunaan Penulisan

1.4.1 Bagi Gereja

Sangat diharapkan agar melalui tulisan ini, umat Allah yaitu Gereja dapat memahami etika politik yang merupakan ketentuan normatif yang harus dilestarikan demi memperjuangkan gagasan politis demi kesejahteraan bersama.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Umat Allah yang hidup bermasyarakat hendaknya berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Karena itu, setiap orang sebagai masyarakat yang beretika harus mampu mengatasi pelbagai bentuk praktek ketidakadilan dalam kehidupan politik.

1.4.3 Bagi Civitas Akademika Fakultas Filsafat

Penulisan ini juga diharapkan dapat membantu Civitas Akademika Fakultas Filsafat yang adalah para calon imam, bruder dan mahasiswa extern, agar dapat secara kritis menentang segala bentuk praktek non-etis dalam berpolitik demi menjamin *Bonum Commune*.

1.4.4 Bagi Penulis Sendiri

Penulisan ini merupakan langkah awal bagi penulis untuk menyelidiki dan mempelajari nilai etis sebuah gagasan politis yang terarah kepada kesejahteraan umum dalam terang *Gaudium et Spes* artikel 74. Penulisan ini kiranya membantu penulis untuk memahami bahwa etika politik sangat dibutuhkan dalam kancah perpolitikan dan dalam kehidupan berNegara.

1.5 Metodologi Penulisan

Penulis menggunakan metode kepustakaan. Penulis berupaya menghimpun gagasan-gagasan dan data-data dari literatur yang tersedia secara selektif dan komprehensif yang berhubungan dengan tulisan ini. Selanjutnya penulis coba menganalisa dan merefleksikannya, hingga menghasilkan tulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Seluruh tulisan ini dibagi ke dalam lima bab: Bab pertama adalah bab pendahuluan. Pada bab ini, dikemukakan tentang penegasan judul, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan keterangan awal tentang keseluruhan pokok pemikiran yang akan dibahas dalam bab berikutnya.

Dalam bab kedua, penulis memaparkan mengenai konsep etika politik. Dalam bab ini, penulis berupaya merumuskan konsep etika politik sebagai media terciptanya tatanan politik yang baik dan benar.

Dalam bab ketiga, penulis coba menguraikan konsep *Bonum Commune* sebagai tujuan dasar dari penerapan etika politik yang baik dan benar dalam kehidupan masyarakat politik.

Dalam bab keempat, penulis akan mendalami konsep etika politik yang mesti dipraktikkan dengan benar oleh para politisi demi menjamin kesejahteraan umum dalam terang *Gaudium et Spes* artikel 74.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan refleksi kritis dari penulis sendiri atas konsep etika politik sebagai gagasan politis yang dapat menjamin kesejahteraan umum dalam terang *Gaudium et Spes* artikel 74.